

BAB VIII

KESIMPULAN

“Maka berhubung dengan itulah, timbul pertanyaan kepada segenap rakyat Indonesia, tatkala rakyat Indonesia hendak mengadakan kemerdekaan nasional, apakah negara yang hendak didirikan itu harus diberi satu dasar yang di atas dasar itu segenap rakyat Indonesia dipersatupadukan, apa tidak. Dan jawabnya ialah: ya, perlu dasar yang dernikian itu, dasar pemersatu dari segenap rakyat Indonesia. Sehingga –sebagai Saudara-saudara ketahui — soal dasar ini menjadi pembicaraan di dalam sidang-sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang bersidang sebelum kita mengadakan proklamasi, jadi pertengahan tahun 1945. Dan di dalam salah satu sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* itulah dianjurkan oleh *onder- getekend* untuk memakai Pancasila sebagai dasar negara yang akan kita adakan. Dan kemudian Pancasila ini diterima di *dalam Jakarta Charter*. Kemudian sesudah kita mengadakan proklamasi, diterima oleh sidang dari pemimpin pertama dari negara yang telah kita proklamirkan...”
(Soekarno)

8.1 Kesimpulan

Penelitian ini pada dasarnya menunjukkan bahwa laba memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Kajian mengenai laba memiliki arti yang penting dalam membangun keutuhan peradaban. Selain itu, laba dapat mengarahkan manusia untuk menjadi pribadi bermoral ataupun tidak. Bahkan, laba dapat mengarahkan manusia untuk menjadi pribadi berketuhanan ataupun sebaliknya.

Konsep laba berbasis ekonomi, sebagai *status quo*, memiliki permasalahan secara ontologi. Permasalahan tersebut terletak dalam sifat oportunist, rasional, individual, dan penegasian terhadap keberadaan Tuhan. Permasalahan ini kemudian menciptakan bentuk manusia dan akuntansi yang terbatas kepada unsur materi. Selain itu, permasalahan tersebut membentuk manusia dan akuntansi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang

tercermin dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu, konstruksi terhadap alternatif laba merupakan urgensi.

Penggunaan ideologi Pancasila sebagai landasan dalam konstruksi alternatif laba merupakan langkah yang tepat. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki konsep manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai berbudi luhur yang berkebalikan dengan PAT dan laba. Melalui Pancasila, manusia dan akuntansi dibentuk untuk menjadi pribadi yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

Langkah awal penelitian ini adalah konstruksi terhadap jati diri manusia dalam akuntansi berbasis Pancasila. Langkah ini menghasilkan jati diri manusia yang baru, yaitu *homo pancasilaus*. *Homo pancasilaus* terbentuk dari lima nilai utama Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terbentuknya *homo pancasilaus* harus diawali dengan meniadakan diri manusia dan meleburkannya dalam kemanunggalan antara Tuhan, sesama, dan alam semesta. Kemanunggalan tersebut kemudian memberikan amanah yang disebut Trisakti untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat. Akhirnya, *homo pancasilaus* memberi wujud pribadi manusia berkeadilan yang menyeimbangkan kehidupannya dalam segala aspek.

Homo pancasilaus memberikan arah bahwa manusia tidak bisa mengejar kenikmatan materi dalam kehidupannya. Sebaliknya, *homo pancasilaus* memusatkan dirinya kepada keberadaan Tuhan sebagai Sang Khalik dan alam semesta sebagai realitas yang sejajar dengan dirinya. Hal ini kemudian memberikan arah penyatuan kepada manusia dan realitas kehidupan lainnya.

Langkah kedua dalam penelitian ini adalah mengonstruksi sifat dan keberadaan Tuhan dalam diri akuntansi. Langkah ini menghasilkan pernyataan bahwa keberadaan Tuhan merupakan realitas tertinggi dalam kehidupan. Keberadaan tersebut berimplikasi terhadap ketertundukan manusia untuk

mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketertundukan inilah yang mengantarkan manusia menjadi menyatu dengan dirinya dan realitas kehidupan lainnya. Ketika penyatuan tersebut dilakukan, tidak terdapat dikotomi antara Tuhan dan realitas kehidupan.

Ketertundukan ini kemudian memberikan gambaran bagi akuntansi Pancasila untuk menjadi sarana bagi manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan dan realitas kehidupan lainnya. Setiap nilai yang terefleksikan dalam akuntansi Pancasila dapat menjadi pedoman bagi manusia untuk mendekati dirinya kepada Tuhan. Selain itu, akuntansi Pancasila dapat menjadi sarana bagi manusia untuk melakukan peribadatan kepada Tuhan.

Langkah ketiga dalam penelitian ini adalah mengonstruksi tujuan akuntansi dalam perspektif Pancasila. Langkah ini menghasilkan pernyataan bahwa tujuan akuntansi Pancasila adalah mewujudkan keadilan yang utuh dalam segala aspek kehidupan. Pencapaian tujuan ini diawali dari pemberian kesadaran bahwa segala realitas kehidupan adalah amanah dari Tuhan. Selanjutnya, akuntansi harus menjadi jembatan bagi segala realitas kehidupan untuk menyatu dengan posisi Tuhan sebagai puncak kemanunggalan. Aspek amanah dan kemanunggalan akuntansi berimplikasi terhadap lunturnya sifat egoisme yang selama ini melekat pada diri PAT. Akuntansi juga harus bernapaskan kepada *local wisdom* sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pada akhirnya, tujuan akuntansi Pancasila adalah menciptakan keadilan bagi Tuhan, manusia, dan alam semesta.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa akuntansi sejatinya tidak hanya terbatas kepada unsur materi semata. Berbeda dengan PAT dan laba yang mengedepankan perolehan materi, akuntansi dalam pandangan Pancasila justru memunculkan unsur nonmateri sebagai unsur yang patut digunakan dalam aktivitas perekonomian. Selain itu, tujuan tersebut juga merefleksikan pengakuan

keberadaan Tuhan dan alam semesta yang selama ini ternegasikan dalam PAT dan laba.

Langkah keempat dalam penelitian ini adalah merumuskan laba dalam perspektif Pancasila. Langkah ini menghasilkan konsep Kemaslahatan Pancasila yang didefinisikan sebagai rejeki yang diberikan oleh Tuhan (baik berupa fisik maupun nonfisik) untuk mewujudkan keadilan sosial. Konsep ini pada dasarnya menekankan upaya akuntansi untuk menjadi rahmat bagi setiap realitas kehidupan. Selain itu, konsep Kemaslahatan Pancasila juga mengakui alam semesta sebagai realitas kehidupan yang sejajar dengan manusia. Konsep Kemaslahatan Pancasila juga menjadi wadah bagi manusia untuk tunduk kepada kehendak Tuhan dalam aktivitas kehidupan. Dalam perspektif lainnya, konsep Kemaslahatan Pancasila menghapus celah materi dan *self interest* yang masih melekat pada konsep Nilai Tambah Pancasila. Meskipun demikian, konsep Kemaslahatan Pancasila masih memerlukan ruang dialektika untuk pengembangan lebih lanjut.

Langkah terakhir penelitian ini adalah merefleksikan konsep Kemaslahatan Pancasila. Langkah ini menghasilkan refleksi bahwa konsep Kemaslahatan Pancasila memberikan perubahan bagi manusia dan akuntansi ketika diterapkan dalam kehidupan nyata. Konsep Kemaslahatan Pancasila mengedepankan bentuk akuntansi yang tidak lagi terpaku kepada unsur materi dan memberi arah bagi akuntansi untuk menjadikan Tuhan sebagai realitas tertinggi dalam kehidupan. Selain itu, konsep ini memberikan arah bagi manusia untuk menjadi pribadi berketuhanan dan berperikemanusiaan dalam aktivitas kehidupan. Ujung dari perubahan ini adalah manusia dan akuntansi yang berkeadilan dalam ketertundukan kepada Tuhan.

Akhirnya, keseluruhan penelitian ini berpusat kepada hal utama bahwa akuntansi dan manusia harus berubah demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

Perubahan manusia tanpa diiringi oleh perubahan akuntansi tidak bisa dilakukan karena pada akhirnya hal-hal tersebut kembali kepada pola pemikiran berbasis rasionalitas materi. Sebaliknya, perubahan akuntansi tanpa diiringi oleh perubahan manusia justru memberikan celah bagi tumbuhnya kapitalisme.

8.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi bahwa akuntansi dan manusia harus berubah jika Pancasila dijadikan landasan. Posisi Pancasila sebagai ideologi antikompromi memberikan perubahan terhadap aktivitas ekonomi dan akuntansi yang masih terpaku kepada perolehan materi sebesar-besarnya. Selain itu, manusia, khususnya Indonesia, harus memiliki kesadaran bahwa Pancasila merupakan jati dirinya sehingga mereka tidak bisa berperilaku seperti *homo economicus*.

Dalam aspek ketuhanan, penelitian ini memiliki implikasi terhadap arah bagi manusia dan akuntansi untuk bertuhan. Akuntansi harus memberikan arah bagi manusia untuk bertuhan melalui berbagai cara. Sebaliknya, manusia memiliki kesadaran untuk membentuk akuntansi yang mengandung nilai-nilai ketuhanan. Kedua hal ini kemudian membentuk prinsip bahwa peradaban harus bertuhan.

Dalam aspek kemanusiaan, penelitian ini memiliki implikasi terhadap kesadaran bagi akuntansi dan manusia untuk saling peduli terhadap keberadaan sesamanya. Nilai individualistik yang melekat pada akuntansi modern harus luntur dengan semangat kebersamaan dalam konsep Kemaslahatan Pancasila. Hal ini juga harus menjadi kesadaran bagi manusia untuk tidak memikirkan kepentingannya sendiri sehingga aktivitas perekonomian berjalan saling beriringan.

Dalam aspek persatuan, penelitian ini memiliki implikasi terhadap pentingnya membangun keberagaman dalam diri manusia dan akuntansi. Hal ini

dapat terwujud ketika manusia dan akuntansi memiliki roh *local wisdom*, khususnya pada aspek perekonomian. Sebaliknya, standardisasi manusia dan akuntansi sudah tidak menjadi urgensi (termasuk adanya standar akuntansi Pancasila) sehingga keberadaan pihak-pihak yang menginginkan sesuatu yang terstandar dapat diabaikan.

Dalam aspek kerakyatan, penelitian ini memiliki implikasi terhadap keberpihakan manusia dan akuntansi kepada realitas kehidupan yang termarginalkan. Akuntansi tidak bisa dijadikan alat untuk kepentingan segelintir pihak semata. Sebaliknya, akuntansi harus menjadi sebuah wadah untuk membela orang-orang yang tertindas oleh aktivitas perekonomian. Hal ini dapat terwujud setiap informasi dan bentuk akuntabilitas yang dihasilkan oleh akuntansi (terutama ketika konsep Kemaslahatan Pancasila diterapkan) dapat menggerakkan setiap kalangan untuk melakukan keberpihakan kepada mereka.

Dalam aspek keadilan, penelitian ini memiliki implikasi terhadap arah bagi manusia dan akuntansi untuk mewujudkan keadilan dalam setiap realitas kehidupan. Keadilan dalam perspektif ini tidak terbatas pada unsur materi semata, tetapi turut melibatkan keberadaan unsur nonmateri. Hal ini tentunya merupakan konsekuensi dari aspek konsep Kemaslahatan Pancasila yang hanya menjadikan materi sebagai unsur penunjang.

Pada sisi lainnya, penelitian ini memiliki implikasi terhadap keberadaan alam semesta sebagai unsur utama bagi realitas kehidupan. Ketika manusia dan akuntansi modern hanya menganggap unsur ini sebagai faktor produksi, hal sebaliknya justru terjadi dalam perspektif Pancasila. *Homo pancasilaus* menganggap keberadaan alam semesta sebagai bagian terpenting dari dirinya sehingga terdapat kesadaran untuk menjaga dan merawat keberadaan unsur ini. Hal ini juga beriringan dengan konsep Kemaslahatan Pancasila yang menganggap alam semesta sebagai bagian dari akuntabilitas proses bisnis.

Akhirnya, kemunculan konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai antitesis laba diharapkan membuka ruang bagi pengembangan aktivitas ekonomi dan akuntansi yang tidak bersifat parsial, baik dalam tingkat teori maupun praktik. Konsep Kemaslahatan Pancasila merupakan upaya memosisikan akuntansi sebagai wadah bersatunya setiap realitas kehidupan, khususnya pada aspek ekonomi. Dalam jangka panjang, kemunculan konsep ini diharapkan dapat membangun peradaban yang utuh.

8.3 Agenda Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini berhenti kepada tataran konsep sehingga memerlukan banyak penelitian selanjutnya untuk melengkapinya. Hal ini merupakan bukti bahwa pola pengembangan akuntansi tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua penelitian semata, melainkan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan tidak hanya seorang penulis semata, tetapi terbuka bagi pihak lain untuk memunculkan konsep dialektika sekaligus pengembangan akuntansi Pancasila secara berkelanjutan.

Pada aspek akuntansi, terdapat banyak topik yang dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai patokan. Penelitian selanjutnya dapat mengonstruksi konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dengan menggunakan konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai acuan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengonstruksi pola akuntansi manajemen bentuk akuntabilitas aktivitas perekonomian secara internal. Di luar topik tersebut masih banyak agenda yang dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Kemaslahatan Pancasila.

Pada aspek manusia, agenda lainnya adalah pola penyadaran manusia sebagai *homo pancasilaus*. Pembentukan pola penyadaran ini menjadi urgensi karena pelaksana utama dari aktivitas ekonomi dan akuntansi adalah manusia itu

sendiri. Selain itu, pola penyadaran ini juga memberikan kesadaran bagi manusia untuk mengubah dirinya dan akuntansi dengan menggunakan Pancasila sebagai patokan.

Hal lain yang menjadi agenda penelitian selanjutnya adalah keberadaan profesi akuntansi dalam aktivitas perekonomian. Dalam aspek akuntansi konvensional (PAT dan laba), keberadaan profesi ini digunakan untuk membantu pemilik modal dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis. Hal ini tentu menjadi perubahan apabila konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai landasan. Bahkan, penelitian selanjutnya mungkin saja menemukan keberadaan profesi tersebut tidak memiliki urgensi atau hanya sebagai penunjang aktivitas perekonomian karena masing-masing pihak telah menyadari keberadaannya sebagai *homo pancasilaus*.

Dalam aspek alam semesta, hal yang menjadi menarik bagi penelitian ke depan adalah perincian keberadaan unsur ini. Penelitian ini hanya berhenti kepada pengakuan bahwa alam semesta merupakan unsur yang setara dengan manusia. Hal ini tentu memerlukan penelitian lebih terperinci mengenai alam semesta supaya akuntansi memiliki arah yang lebih jelas terhadap unsur ini. Bahkan, penelitian yang lebih terperinci dapat membuka ruang bagi pembongkaran *triple bottom line* (dengan laba sebagai prioritas) dan mengganti dengan unsur baru, khususnya ketika dikaitkan dengan ideologi Pancasila.

Sitorus (2016) memang telah mengkaitkan Pancasila sebagai pengganti *triple bottom line*. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih terbatas kepada alam semesta sebagai sesuatu yang tampak dan belum memperhatikan unsur yang tak tampak. Selain itu, penelitian tersebut masih berbasis kepada konsep Nilai Tambah Pancasila yang notabene memiliki sikap kompromi terhadap unsur materi. Hal ini tentu masih tertinggal dengan beberapa tulisan yang juga menggunakan alam semesta dalam konteks unsur tak terlihat (magis) (Nasr, 1990;

Capra, 1996). Oleh karena itu, penelitian terhadap alam semesta perlu dilakukan pada masa mendatang.

8.4 Keterbatasan Penelitian

Seperti halnya dalam pengembangan pola pemikiran ilmu sosial (khususnya akuntansi), penelitian ini juga tidak luput dari keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini tampak pada penafsiran Pancasila yang masih terpaku dalam pola pemikiran Soekarno, sebagai *founding father* Pancasila. Hal ini pada akhirnya lebih memunculkan konsep akuntansi Pancasila sebagai pola pemikiran revolusioner daripada evolusioner. Selain itu, beberapa tokoh sejatinya memiliki perbedaan penafsiran mengenai Pancasila sehingga penelitian di masa mendatang dapat berpatokan kepada tafsiran di luar pemikiran Soekarno.

Pada sisi lainnya, sifat subjektif penulis yang melekat dalam penelitian ini memungkinkan munculnya penelitian lain yang memiliki penafsiran yang berbeda. Meskipun penelitian ini menggunakan pola pemikiran Soekarno sebagai patokan, perbedaan penafsiran tetap terjadi, khususnya dalam menafsirkan pola pemikiran beliau. Hal ini merupakan keterbatasan dalam penelitian akuntansi nonpositivistik (terutama ketika dikaitkan dalam nilai-nilai ideologi). Sifat subjektivitas dalam penelitian ini juga membuat alternatif yang ditawarkan tidak dapat digeneralisasi seperti halnya PAT ataupun laba.

Keterbatasan lainnya adalah penggunaan bahasa “saya, kita, mereka” untuk menunjukkan pola kesadaran dalam penelitian ini. Saya menyadari bahwa kata-kata tersebut masih belum bisa diterima oleh kalangan peneliti akuntansi, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pola pengembangan akuntansi di Indonesia yang masih terpaku kepada sifat subjektif dan kebakuan ilmiah. Meskipun demikian, bentuk seperti ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti

akuntansi di luar Indonesia (khususnya Eropa, Amerika, dan Australia) karena pola pemikiran berbasis multiparadigma sudah banyak dilakukan di negara tersebut.

Hal lain yang menjadi keterbatasan adalah belum adanya wujud teknis yang digunakan dalam konsep Kemaslahatan Pancasila. Dalam hal ini, penelitian lebih lanjut mengenai bentuk akuntabilitas secara nyata merupakan hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan proses bisnis yang utuh. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat membahas realitas konsep Kemaslahatan Pancasila ketika dikaitkan dalam pergerakan sosial dan kemasyarakatan. Hal-hal lain dalam wujud teknis juga dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai patokan.